

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Semenanjung Korea memiliki wilayah yang dinilai memang cukup besar, memiliki panjang hingga 1000 km dan memiliki lebar 216 km (Seung-Yoon & Mas'ood, 2003, hal. 1). Terdapat zona demiliterasi yang merupakan pembatas antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Kedua negara tersebut merupakan pendudukan atas dua kekuatan besar pemenang Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet (Seung-Yoon & Mas'ood, Memahami Politik Korea, 2005, hal. 237). Pembagian tersebut dilakukan secara sepihak oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas Konferensi Kairo yang menyatakan bahwa Korea harus menjadi negara yang bersatu.

Namun pada tahun 1945, munculah Konferensi Yalta, yang memperbolehkan Uni Soviet untuk menidirikan negara sebagai zona penyangga dalam memberikan bantuan melawan Amerika Serikat (Weathersby, 1993, hal. 10). Adanya usaha yang dilakukan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam membentuk pemerintahan masing-masing, akhirnya terbentuk *Democratic People of Republic Korea* yang dikenal dengan Korea Utara dan Republic of Korea yang dikenal sebagai Korea Selatan. Pemisahan tersebut diketahui dan dibawah arahan PBB, hal tersebut dilakukan karena tidak adanya titik temu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam mengimplementasiian amanat PBB dalam penyatuan terhadap Korea (Stueck, 1997).

Korea Utara sendiri merupakan salah satu negara komunis yang ada di dunia. Memiliki ibu kota di kota terbesar yaitu Pyongyang. negara dengan satu partai yaitu Partai Buruh Korea. Pemerintahan yang dijalankan menganut ideologi Juche, yaitu ideologi yang menyatakan bahawa mereka percaya pada kekuatan sendiri. Ideologi tersebut digagas oleh Kim Il-sung, mantan pemimpin negara tersebut. Juche menjadi ideologi resmi ketika Korea Utara mengadopsi konstitusi baru pada

tahun 1972 . terjadinya Perang Korea dapat dikatakan akibat munculnya sifat permusuhan yang berawal dari adanya perbedaan pendapat antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Uni Soviet sendiri pada waktu itu mendukung secara penuh terhadap Korea Utara, sehingga pada awal perang Korea Utara dapat mengalahkan Korea Selatan. Walaupun dari pihak PBB memberikan peran dalam perdamaian perang tersebut, dikarenakan adanya campur tangan oleh China, menjadikan konflik tersebut sulit dipadamkan. Sehingga pada tahun 1953 diputuskan perjanjian gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Walaupun demikian, secara resmi perang korea yang melibatkan Korea Utara dengan Korea Selatan masih belum melakukan perjanjian perdamaian hingga sekarang.

Persenjataan nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara, pada awalnya diperoleh pada saat penjajahan Jepang. Dimana Jepang mendirikan industri militer di kawasan Korea Utara, namun semenjak adanya kejadian di Hiroshima dan Nagasaki yang menandakan kekalahan Jepang di Perang Dunia II, membuat Jepang mundur dari wilayah Korea Utara. Pengetahuan tentang nuklir diperoleh Korea Utara sebagai senjata pemusnah masal mulai membuat Korea Utara berkeinginan untuk memilikinya. Dimulai pada tahun 1947, dimana Uni Soviet yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Gorbachev melakukan penelitian mengenai biji monazite, yaitu salah satu bahan untuk pembuatan nuklir. Karena penelitian tersebut, ternyata didalam biji monazit terkandung bahan - bahan yang dapat menadi pengganti uranium (PBSNewsHour, 2016).

Pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea utara dimulai pada tahun 1956, dimana Korea Utara mendapatkan kerjasama dengan Uni Soviet untuk menggunakan energi nuklir secara damai. Setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama, mulailah Korea Utara mengirimkan ilmuwan dan teknisi terbaiknya ke Uni Soviet untuk mempelajari cara memproses uranium untuk dijadikan energi nuklir. Program tersebut merupakan program yang diselenggarakan oleh Uni Soviet

dalam rangka melatih para ilmuwan dan teknisi dari negara komunis lainnya (Heo & Woo, 2008, hal. 490). Kemudian pada tahun 1965, ditandai dengan didirikannya Akademi Militer di hamsung, yang mana para prajurit tentara Korea Utara dilatih dalam pengembangan rudal (Joseph S. Bermudez, 1999, hal. 2). Serta pada tahun yang sama, Uni Soviet memberikan bantuan besarnya dengan mendirikan pusat penelitian dan fasilitas nuklir di Yongbyon. Dari bantuan tersebut, perlahan Korea Utara mulai meningkatkan program pengembangan nuklir yang dimilikinya.

Bermula dari pengenalan dan bantuan Uni Soviet terhadap program nuklir, Korea Utara mulai menunjukkan dirinya bahwa mereka akan menggunakan berbagai cara agar program pengembangan nuklir mereka dapat berjalan dan menjadi alat yang nantinya dapat digunakan sebagai alat pertahanan negara. Dengan berbagai macam kemajuan, akhirnya juga dapat diketahui oleh Amerika Serikat melalui satelit yang mereka miliki. Sehingga Amerika Serikat merasa jika Korea Utara memiliki senjata nuklir, akan membahayakan bagi negara-negara sekitarnya sebagai sekutu Amerika Serikat seperti Korea Selatan dan Jepang. Sehingga dilakukanlah berbagai cara dari diplomasi, tekanan, hingga sanksi terhadap Korea Utara agar menghentikan program nuklir yang mereka miliki. Bersama dengan Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat beserta sekutunya telah melakukan banyak hal agar terjadi denuklirisasi di Korea. Namun dari sekian pembicaraan baik secara bilateral maupun multilateral, selalu mengalami jalan buntu atas penyelesaian dari kepemilikan Nuklir oleh Korea Utara.

Amerika Serikat pada masa Barack Obama sebagai Presiden, dalam politik luar negerinya, telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menghentikan sikap Korea Utara yang masih enggan melakukan denuklirisasi. Baik dengan kebijakan luar negeri Strategic Patience Approach, yaitu kebijakan dimana Amerika Serikat akan bersikap sabar terhadap Korea Utara, dimana Amerika Serikat akan bersikap

menunggu sikap Korea Utara untuk memberikan reaksi yang akan dikeluarkan nantinya hingga kebijakan dalam memberikan sanksi terhadap Korea Utara baik melalui negaranya sendiri ataupun bekerjasama dengan Dewan Keamanan PBB.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya krisis nuklir di Semenanjung Korea dari awal Barack Obama menjabat sebagai presiden hingga masa akhirnya, Korea Utara masih tetap memperlihatkan atas semakin majunya program nuklir yang mereka miliki. Bahkan dapat diprediksi nantinya dapat memberikan ancaman terhadap negara sekitarnya hingga terhadap Amerika Serikat sendiri. Sehingga sikap Korea Utara yang sering berubah-ubah kebijakan Nuklirnya terhadap dunia internasional, hanya digunakan agar mendapatkan bantuan ekonomi atau menurunkan sanksi yang mereka dapatkan. Hal tersebut semakin mempersulit dunia internasional untuk dapat mempercayai negara tersebut.